MANAJEMEN KEBIJAKAN DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI PUBLIK

Lukman Hakim

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp. 0411 – 866972 ext. 107 Fax. 0411 – 865588

ABSTRAK

Partisipasi publik merupakan komponen vital bagi segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara top down, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Partisipasi publik sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Oleh sebab itu dalam membangun partisipasi publik tersebut maka pemerintah daerah perlu melakukan terobosan dengan mengembangkan manajemen kebijakan diantaranya kebijakan Sisduk, Pemberdayaan Masyarakat, dan Peningkatan Kinerja aparat pemerintah. Tulisan ini menggunakan metode content analysis terhadap informasi hasil penelitian *The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO)* yang telah dipublikasikan, serta analysis terhadap hasil penelitian tesis dua orang mahasiswa pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar yang penulis sendiri bimbing dalam proses penelitiannya.

Kata Kunci: Manajemen Kebijakan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja.

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan penilaian " *The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO), K*abupaten Takalar mendapat *Tropi Otonomi Award* 2010 kategori daerah dengan profil menonjol partisipasi publik dan kesinambungan politik lokal. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang terus berinovasi dan melakukan terobosan di bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu program unggulannya adalah Sistem Dukungan Terpadu Pembangunan di Desa yang disingkat Sisduk (Usman, 2010). Kabupaten Takalar yang berpenduduk miskin 31.17 juta jiwa atau 16,6 persen dari total jumlah penduduk (BPS, 2009) harus bersaing dengan empat daerah lainnya yang didominasikan untuk kategori yang sama yakni Kabupaten Luwu Utara, Soppeng, Sinjai dan Kepulauan Selayar. Menurut peneliti FIPO, Usman (2010) Kabupaten Takalar meraih skor tertinggi dari 23 kabupaten/kota lainnya yakni 730 poin, sementara Luwu Utara dan Soppeng memperoleh nilai sama 727 poin, Sinjai dan Selayar masing-masing 722 dan 721 poin.

Fenomena tersebut sangat menarik terlebih bagi daerah yang sementara membangun sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana proses pembangunan tidak hanya menjadi tumpuan pemerintah saja secara *top down*, tetapi harus dilakukan dengan kemampuan membangun partisipasi publik. Oleh sebab itu fenomena tersebut perlu menjadi sebuah pembelajaran untuk dikaji lebih mendalam mengenai fakta-fakta apa saja yang menjadi faktor dominan dalam membangun partisipasi publik. Keberhasilan dalam membangun partisipasi publik selain terkait dengan adanya kegiatan dalam kebijakan Sisduk pemerintah daerah Kabupaten Takalar, terkait pula dengan strategi peningkatan kinerja aparat (Sukri, 2010) dan kemampuan mengembangkan pemberdayaan masyarakat (Dewi, 2010). Hasil penelitian dua orang mahasiswa Pascasarjana Unismuh Makassar tersebut menjadi tambahan rujukan analisis tulisan ini. Sedangkan analisis hasil penelitian FIPO dilakukan penulis dengan menggunakan metode *content analysis*.

B. LANDASAN TEORI

Partisipasi Publik

Pengembangan partisipasi publik merupakan sebuah pendekatan dalam program pemberdayaan masyarakat. Menurut Ndraha (1990) pada fase permulaan gerakan pembangunan desa di berbagai negara, parakarsa *(initiative)* yang disebut partisipasi sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa, tida segera tergerak. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Berbagai sumber menyatakan, penggerakan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri (PBB; Bhattacharyya, ADB dan Bhattacharyya dalam Ndraha, 1990).

Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi sebagai gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksaanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff, 1992). Partisipasi adalah suatu proses dimana berbagai pelaku (*stakeholders*) dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta pengalokasian berbagai sumberdaya yang berpengaruh terhadap mereka (Bank Dunia, 2007).

Mubyarto (1984) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Nelson dalam Bryant dan White (1982) menyebut dua macam partisipasi, yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama partisipasi vertikal. Keterlibatan dalam berbagai kegiatan politik seperti pemberian suara dalam pemilihan, kampanye dan sebagainya, disebut partisipasi dalam partai politik. Sedangkan keterlibatan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disebut partisipasi dalam proses administrasi.

Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individu dalam kegiatan kelompok disebut partisipasi individual. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bertujuan membangun prakarsa dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal antara satu dengan lainnya baik dalam melakukan usaha bersama maupun dalam rangka melakukan kegiatan dengan pihak lain.

Dalam pembangunan pedesaan di Indonesia, partisipasi sepenuhnya dari segenap lapisan masyarakat termasuk kelompok miskin adalah komponen vital dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri. Oleh sebab itu seringkali diperlukan pendekatan partisipatif dalam pengembangan masyarakat, karena memberi manfaat dalam pelaksanaan program, antara lain; efisien, efektif, menjalin

kemitraan, memberdayakan kapasitas, memperluas ruang lingkup, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, berkelanjutan, memberdayakan kelompok marjinal dan meningkatkan akuntabilitas.

Salah satu sisi masalah dalam pendekatan partisipatif ini adalah membutuhkan biaya yang besar dan lambatnya proses pengambilan keputusan. Namun demikian, pengembangan partisipasi tersebut akan mendukung keberhasilan dari pelaksana program yang didampingi dan memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tergantung kemauan politik (*political will*) dari pemerintah yang berkuasa. Dalam pelaksanaannya, proses partisipatif seharusnya dimulai sejak identifikasi dan analisis *stakeholders*, konsultasi tingkat daerah, penyusunan program pembangunan (strategi program, program investasi, program pembiayaan, dan program pengembangan kelembagaan), proses pengawasan hingga monitoring dan evaluasi. Dengan demikian pengembangan partisipatif dalam pengembangan masyarakat diharapkan selalu muncul dalam setiap penggalian aspirasi dan kebutuhan, konsultasi, penyepakatan, dan pengambilan keputusan.

Keuntungan-keuntungan lainnya dalam pengembangan partisipasi dalam proses pemberdayaan masyarakat, antara lain:

(1) Mampu merangsang timbulnya swadaya masyarakat yang merupakan dukungan penting bagi pembangunan
(2) Mampu meningkatkan motivasi dan keterampilan masyarakat dalam membangun
(3) Pelaksanaan pembangunan semakin sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
(4) Jangkauan pembangunan menjadi lebih luas, meskipun dengan dana yang terbatas
(5) Tidak menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan pihak lain.

Prinsip-prinsip tersebut dikembangkan sesuai dengan kondisi lokalitas dan komunitas untuk mengembangkan kreativitas dalam upaya mengembangkan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Manajemen Kebijakan

Manajemen kebijakan di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumberdaya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan dana dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan efektif (Bryson, 1988). Kebijakan dalam membangun partisipasi publik berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah tertentu). Misalnya, gagalnya kebijakan tertentu dalam upaya mengatasi suatu masalah pada suatu tingkat yang dianggap memuaskan, atau ada masalah tertentu yang sudah sekian lama dipersepsikan belum pernah tersentuh oleh kebijakan pemerintah (Wahab, 1997). Pada kasus membangun partisipasi publik yang bertujuan membangun prakarsa setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal dalam suatu proses pembangunan seringkali diperlukan agenda kebijakan publik. Kebijakan Sisduk pemerintah daerah Kabupaten Takalar merupakan salah satu terobosan yang perlu menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah lainnya, sepanjang memenuhi kriteria tertentu.

Hogwood dan Gunn (1986) menyebutkan bahwa secara teoritis, suatu isu akan cenderung memperoleh respons dari pembuat kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan publik kalau memenuhi beberapa kriteria tertentu, antara lain: a) isu tersebut telah mencapai suatu titik kritis tertentu, b) isu tersebut menyangkut kepentingan orang banyak, c) isu tersebut menjangkau dampak yang amat luas, dan d) isu tersebut mudah dirasakan kehadirannya. Kriteria tersebut dapat menjadi kerangka acuan dalam praktek kebijakan di Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah dalam membangun prakarsa masyarakat merupakan aplikasi nilai-nilai keadilan, kebebasan dan kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut merupakan tiga dari lima nilai kebaikan publik yang disebutkan oleh Fisterbusch (1983) diantaranya nilai keamanan (*security*), hukum dan ketertiban umum (*law and order*), keadilan (*justice*), kebebasan (*liberty*), dan kesejahteraan (*welfare*).

Para pemikir kebijakan publik berpendapat bahwa kesejahteraan umum itu haruslah dimaksimalkan dengan jalan memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sejumlah besar orang. Dalam teori kebijakan publik dikenal prinsip utilitarian sebagai prinsip yang etis karena memperjuangkan manfaat yang sama bagi setiap orang untuk merumuskan manfaat, kebahagiaan, dan kemaslahatan menurut keinginannya sendiri. Demikian pula perlu adanya kebebasan dan persamaan yang penuh serta memberikan perlakuan yang adil dan sederajat terhadap si lemah yakni mereka yang tak beruntung dalam masyarakat. Menurut pandangan Rawls dalam Wahab (1997), kebebasan itu adalah dalam artian hak-hak politik dasar, sedangkan keadilan adalah persamaan memperoleh kesempatan serta perlakuan yang positif terhadap si lemah. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kebijakan sistem dukungan (Sisduk) merupakan nilai tambah terhadap upaya untuk memaksimasi kebaikan sosial atau kemaslahatan umum bagi warga miskin dan sebagai upaya untuk membuat kebijakan publik yang lebih etis.

Kebijakan Sistem Dukungan Terpadu dalam Pembangunan

Sistem Dukungan (Sisduk) merupakan terobosan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Takalar. Kebijakan Kegiatan Sisduk menurut Usman (2010) antara lain:

pertama, pelatihan-pelatihan yang ditujukan bagi para pelaksana pembangunan masyarakat desa yaitu aparat pemerintahan desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelatihan-pelatihan khusus untuk para anggota kelompok masyarakat.

Kedua, pelaksa-naan sistem dukungan melalui pendampingan pada kelompok masyarakat agar mereka mengetahui ciri khas daerahnya sendiri, masa depannya, serta pengorganisasian masyarakat melalui berbagai aktivitas-aktivitas kecil yang dititik beratkan pada kemampuan dan kebutuhan mereka.

Ketiga, memberi dana stimulan (perangsang) sebagai tambahan dari swadaya masyarakat untuk kelompok-kelompok agar mereka berpartisipasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan berdasarkan kebutuhan mereka. Tujuan utama kebijakan ini adalah membangun kemampuan masyarakat lokal agar mereka dapat mandiri dan mampu mengidentifikasi, memecahkan, dan melaksanakan kegiatan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Sisduk mampu mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat yang melebihi dana yang dikeluarkan pemerintah. Berikut tabel pengeluaran pemerintah Kabupaten Takalar untuk kegiatan Program Sisduk

Tabel 1.
Pengeluaran Pemerintah untuk Program Sisduk (Milyard)

TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH	PENGELUARAN MASYARAKAT (DANA PARTISIPASI)
2003 – 2006 2009	7,9 1	11, 59 1,69

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder, 2010

Dana pengeluaran pemerintah sebanyak 7,9 milyar rupiah maupun pengeluaran masyarakat sebanyak 11,59 milyar rupiah pada tahun 2003-2006 digunakan untuk membantu 17.957 Kepala Keluarga (KK) dan 3.017 kelompok masyarakat. Sedangkan pengeluaran pemerintah tahun 2009 sebanyak 1 milyar rupiah dan 1,69 milyar rupiah dana partisipasi masyarakat mampu membangkitkan partisipasi bidang ekonomi dan sosial masyarakat yang diperuntukkan untuk kegiatan bidang ekonomi seperti pengadaan pompa air untuk pertanian, pupuk, perikanan mesin alat tangkap, rumput laut, dan industri rumah tangga. Sedangkan dana pengeluaran untuk kegiatan bidang sarana dan prasarana seperti pengadaan air bersih, jamban keluarga, pengairan tersier, dan jalan tani/jembatan hingga kegiatan sosial seperti rehabilitasi masjid/musalah, dan pembangunan TK/TPA. Kegiatan tersebut telah membawa banyak perubahan di Takalar seperti tumbuhnya kelompok-kelompok di dalam masyarakat sebagai wadah kerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama. Hingga tahun 2008 telah terbentuk sebanyak 4.653 kelompok.

Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP).

Salah satu keberhasilan dalam membangun partisipasi publik di Kabupaten Takalar adalah keberhasilan mengimplementasikan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MP)di sebagian perdesaan. Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dimulai sejak tahun 2007 dengan program pengembangan masyarakat mulai diperluas tahun 2008 dengan melibatkan program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) untuk mengingrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan daerah lainnya. Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, maka di daerah ini dilaksanakan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) dan pendamping lokal (PL) program PNPM mandiri. Sesuai dengan visi dan misi PNPM mandiri maka strategi yang dikembangkan di daerah ini adalah menjadikan rumah tangga miskin (RTM) sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif serta mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. PNPM mandiri pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih.

Menurut hasil penelitian Dewi (2010), PNPM Mandiri Perdesaan sangat berpengaruh menekan permasalahan sosial sebagai dampak kemiskinan, antara lain permasalahan lapangan kerja, menekan rendahnya tingkat pendidikan, menekan peningkatan angka kriminalitas, dan menekan berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat, dan menekan rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup.

Dengan adanya PNPM Mandiri Perdesaan kegiatan bidang ekonomi seperti kerajinan rumah tangga (*home industri)* membangkitkan kembali peluang masyarakat mengembangkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan rumah tangga seperti pembuatan keramik, pembuatan kursi tamu, dan pembuatan kue dan makanan jadi lainnya. Dengan dana bergulir pada program PNPM mandiri, maka tingkat kriminalitas seperti pencurian ternak dan kecemburuan sosial antar desa/kampung dapat ditekan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya kriminalitas dan persoalan sosial lainnya tidak terlepas dari kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat. Meskipun demikian menurut Dewi (2010), Indeks Pembangunan Manusia (*human Development index*) di daerah ini masih sangat rendah, dibandingkan dengan kualitas manusia di daerah/negara lainnya.

Kebijakan Peningkatan Kinerja Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah merupakan motor penggerak utama dalam membangkitkan partisipasi publik dalam pembangunan, dan oleh karena itu aparat harus bersikap sebagai pelayan atau memberi pelayanan, dan bukan sebagai penguasa (Tjokroamijoyo. 1987). Pemerintah adalah pengambil prakarsa terlebih dahulu dalam bentuk pembangunan untuk masyarakat (Hanson, Bhattacharyya dalam Ndraha, 1990). Dengan catatan tidak mematikan inisiatif masyarakat itu sendiri. Pemerintah dengan aparat yang dimiliki berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri. Misalnya dalam hal perencanaan, pada awalnya pemerintah melakukan perencanaan untuk masyarakat (*planning for community*), kemudian perencanaan bersama masyarakat (*planning with community*). Dan akhirnya perencanaan oleh masyarakat (*planning by community*).

Menurut Sukri (2010) salah satu keberhasilan dalam membangun partisipasi publik dalam pembangunan di Takalar adalah adanya langkah-langkah strategis peningkatan kinerja aparat pemerintah, antara lain: (1) meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang profesional, disiplin dan penuh tanggung jawab, (2) mewujudkan pelayanan umum masyarakat yang prima dan penyelengaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, (3) meningkatkan sistem informasi pelaksaanaan kegiatan, dan (4) mewujudkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan strategis tersebut di

dukung oleh (1) adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan, (2) adanya jaminan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, (3) ketersediaan sarana dan prasarana, (4) kemampuan aparat dalam mengelola teknologi informasi, dan (4) adanya hubungan kerja yang baik antar aparat.

Namun demikian peningkatan kinerja aparat menghadapi pula beberapa kendala atau kelemahan diantaranya masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, terbatasnya kemampuan keuangan daerah, kurangnya pemahaman pegawai terhadap rencana pembangunan pemerintah daerah, serta belum tersusunnya indikator kinerja aparat pemerintah.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu:

1. Partisipasi publik merupakan komponen vital dalam suatu proses pembangunan yang mendorong terciptanya masyarakat yang mandiri.
2. Kebijakan pemerintah daerah yang terus berinovasi dan melakukan terobosan di bidang partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kebijakan yang akan berdampak pada terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*)
3. Kebijakan sistem dukungan terpadu dalam pembangunan mampu membangkitkan partisipasi masyarakat dalam berprakarsa baik di bidang ekonomi maupun sosial
4. Kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok masyarakat miskin sebagai sasaran
5. Peningkatan kinerja aparat pemerintah mampu berperan memberi bimbingan dan bantuan teknis perencanaan pembangunan kepada masyarakat desa dengan maksud agar pada suatu saat masyarakat mampu melakukannya sendiri.

SARAN

Agar pemerintah daerah dapat lebih mampu mengembangkan partisipasi publik dalam pembangunan, maka beberapa masukan sebagai saran dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu lebih berperan membuat terobosan kebijakan, agar pelaksanaan program pembangunan tidak lagi bertumpu pada peran pemerintah, tetapi mampu melibatkan peran serta masyarakat baik dalam perencanaan program maupun dalam pelaksanaan
2. Partisipasi publik tidak akan berjalan sendiri, melainkan perlu adanya komitmen dan dukungan finansial dan ketersediaan sarana dan prasarana serta dukungan kemampuan aparat baik kualitas maupun kuantitas.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia. 2007. *Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. (Terjemahan) Penerbit: *The World Bank*

Badan Pusat Statistik, 2009. *Takalar dalam Angka,* Takalar: Badan Pusat Statistik

Tjokroamijoyo, Bintoro. 1987. Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES.

Bryant, C and White, L.G, 1982. *Managing Development in The Third World*, Boulder Colorado: Westview Press.

Bryson, John, 1988. "*Strategic Planning for Publik and Nonprofit Organizations*". Jossey Bass Publishers, San Fransisco

Dewi, Ratna. 2010. *Efektivitas Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan Di Kecamatan Polombangkeng Selatan Kabupaten Takalar* (Tesis), Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Fisterbusch, Kurt. 1983. *Evaluation Methods, dalam Social Impact Assesment Methods, Kurt fisterbusch et all (eds).* London: Sage Publication Ltd.

Hogwood, Brian W and Lewis A. Gunn (1986). *Policy Analysis for the Real World.* Oxford University Press.

Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Pedesaan*. Yokyakarta: P3PK UGM

Ndraha, Taliziduhu. 1990. Pembangunan Masyarakat, Jakarta: Rineka Cipta

Sukri, Muhammad. 2010. *Strategi Peningkatan Kinerja Organisasi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar* (Tesis), Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Uphoff, N. 1988. *Local Institutional Development*. Fransisco: Cornell University Press

Usman, Sundari. 2010. *Menggalang Potensi, Membangun Kemandirian Lokal* (Laporan Penelitian), Artikel Otonomi Award, The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO), Harian Fajar,21 Juli 2010, Hal. 29

Wahab, Solichin Abdul, 1987. *Analisis Kebijaksanaan*, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta.

****